

E-Partisipasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akurasi Perhitungan BOSDA di Kabupaten Mojokerto

Dian Anita Nuswantara*¹, Sri Setyo Iriani², Budi Purwoko³, Sujarwanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

*Corresponding Email: diananita@unesa.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema kebijakan anggaran pendidikan di Kabupaten Mojokerto ini bertujuan untuk membuat model pengembangan partisipasi publik sebagai stakeholder pendidikan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan rasionalitas kebijakan dinas pendidikan dan mendorong keberterimaan hasil kebijakan biaya operasional sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang ditindaklanjuti dengan pengembangan program aplikasi survey berbasis web. Hasil pengembangan program survey ini telah menunjukkan manfaat dari sudut efisiensi biaya dan waktu, keakuratan perhitungan, serta memberikan manfaat utama yaitu meningkatkan partisipasi publik meliputi sekolah baik negeri maupun swasta, komite sekolah dan masyarakat umum. Rekomendasi kepada dinas pendidikan adalah mengembangkan program survey berbasis web untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: BOPDA, partisipasi publik, stakeholder pendidikan, web-survey

ABSTRACT

This community service activity with the theme of education budget policy in Mojokerto Regency aims to create a model for developing public participation as an education stakeholder as well as an evaluation material to improve the rationality of education office policies and encourage acceptance of school operational cost policy results. The implementation method is carried out by holding a Focus Group Discussion (FGD) which is followed up with the development of a web-based survey application program. The results of the development of this survey program have shown benefits in terms of cost and time efficiency, accuracy of calculations, as well as providing the main benefit of increasing public participation including public and private schools, school committees and the general public. The recommendation to the education office is to develop a web-based survey program to improve service quality and education quality in Mojokerto Regency.

Keywords: BOPDA, public participation, education stakeholder, web-survey

PENDAHULUAN

Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat total pendapatan cukup tinggi selama tahun 2015 hingga 2019. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun terakhir mencapai 5%. Total pendapatan pada tahun 2019 bahkan mencapai lebih dari 885 miliar rupiah dengan Pendapatan Asli Daerah mencapai lebih dari 192 miliar rupiah. Dengan demikian perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan mencapai 22,69%. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan daerah dari perspektif sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Semakin besar proporsi pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan suatu daerah mencerminkan tingkat

kemandirian atau derajat kemandirian fiskal daerah ditinjau dari pendekatan penerimaan (Amarullah, 2013). Tingkat kemandirian suatu daerah dikatakan baik apabila lebih dari 40% dan sebaliknya dikategorikan kurang jika kurang dari 20% (Huda & Fitriyah, 2017). Derajat kemandirian fiskal Kabupaten Mojokerto dihitung dengan rumus yang dikembangkan oleh Hunter pada tahun 1977 menghasilkan derajat kemandirian sedang karena berada pada kisaran lebih dari 20% dan kurang dari 40%. Meskipun berada dalam kategori sedang, namun angkanya berada pada batas bawah kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Kabupaten Mojokerto masih rendah (Huda & Fitriyah, 2017). Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Pendapatan tersebut diperoleh melalui pemanfaatan potensi alam dan ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang mengelola.

Peran kualitas sumberdaya manusia juga ikut menentukan besarnya pajak daerah, semakin baik kualitas sumberdaya manusia yang mengelola pajak maka semakin tinggi pendapatan daerah tersebut (Huda et al., 2018).

Uraian di atas menunjukkan bahwa sumberdaya manusia berkualitas penting bagi pembangunan ekonomi. Wernerfelt (1984) memelopori teori *resource-based view* (RBV) yang memandang sumberdaya dan kemampuan perusahaan sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, sumberdaya acapkali dijadikan sebagai dasar daya saing dan kinerja perusahaan. Sebuah studi di Kabupaten Purworejo, Desa Donorejo, berhasil menyusun 3 program prioritas pembangunan yaitu pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan pengembangan sumberdaya manusia (Zahra et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah juga ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia. Namun ironinya, menurut data Kabupaten Mojokerto dalam angka, tahun 2020 hanya 40% penduduk yang memiliki ijazah setingkat SMA bahkan jumlah penduduk yang tidak bersekolah di usia 16-18 masih cukup tinggi yaitu 25,6% laki-laki dan 12% wanita.

Perbedaan antara teori RBV dan hasil empiris dengan statistik pendidikan masyarakat di Kabupaten Mojokerto menampilkan adanya gap yang dapat menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pendidikan yang seharusnya menjadi faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia masih menjadi tugas yang harus segera diselesaikan oleh Kabupaten Mojokerto. Rendahnya pendidikan di suatu daerah ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya motivasi dan pendapatan masyarakat (Sulvia & Nursalam, 2020). Di satu sisi kondisi ekonomi menjadi penyebab faktor rendahnya tingkat pendidikan, namun tingkat pendidikan yang rendah juga berdampak pada tingkat perekonomian. Tingginya biaya pendidikan berkualitas masih menjadi beban pemerintah baik pusat maupun daerah. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat meluncurkan program bantuan operasional sekolah (BOS) sejak tahun 2000. Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat dan perbedaan kondisi setiap daerah maka pemerintah hanya memberikan bantuan yang lebih bersifat subsidi bukan membiayai secara penuh. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah sebagai pemangku urusan wajib pendidikan dasar perlu memenuhi kekurangan BOS pusat tersebut dengan mengalokasikan dari dana pemerintah setempat. Permasalahan timbul ketika pemerintah daerah belum pernah melakukan perhitungan biaya operasional sekolah yang sesungguhnya. Karena rencana anggaran belanja sekolah yang dibuat secara rutin oleh sekolah seringkali menyebabkan penyusunan anggaran tidak berdasarkan pada perhitungan yang cermat melainkan lebih bersifat rutinitas. Dengan demikian, anggaran yang disusun tidak mencerminkan harapan stakeholder dan target pendidikan berkualitas sesuai standar pendidikan.

Permasalahan pendidikan di suatu daerah bukan saja menjadi urusan otoritas pemerintah daerah, melainkan juga menjadi perhatian pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten

Mojokerto, diantaranya manajemen sekolah, komite sekolah, orang tua, lembaga kemasyarakatan serta masyarakat umum. Permasalahan tersebut mendorong tim pengabdian kepada masyarakat ini mencoba menggali harapan para stakeholder serta melibatkan mereka dalam proses perhitungan biaya pendidikan di Kabupaten Mojokerto dengan memanfaatkan *internet of things* untuk meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan sehingga dapat diperoleh hasil perhitungan yang dapat menggambarkan kebutuhan pengembangan pendidikan berkualitas.

Tim pengabdian kepada masyarakat mengadakan diskursus tentang penganggaran biaya pendidikan dan tujuan pendidikan nasional untuk menyamakan persepsi antara otoritas pengambil kebijakan pendidikan dengan sekolah beserta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan definisi pendidikan berkualitas bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Mojokerto. Tim juga mengusung permasalahan kedua yaitu seberapa besar dan luas cakupan yang dapat dijangkau dalam E-partisipasi untuk mendorong transparansi dan akurasi hasil perhitungan. Dengan demikian hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat digunakan sebagai model pengembangan partisipasi publik sebagai stakeholder pendidikan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan rasionalitas kebijakan dinas pendidikan dan mendorong keberterimaan hasil kebijakan biaya operasional sekolah.

METODE

Berdasarkan uraian permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, terdapat dua strategi yang diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian. Permasalahan pertama, yaitu adanya perbedaan pandangan setiap stakeholder pendidikan yang dapat mengancam ketercapaian visi dan misi pendidikan Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan teori kongruensi tujuan, maka penyamaan persepsi merupakan kondisi awal yang harus ada untuk mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder pendidikan. Perbedaan demografi dan karakteristik masyarakat Kabupaten Mojokerto yang beragam dapat diatasi dengan mengadakan pertemuan untuk meningkatkan kesepahaman. Pertemuan harus dilakukan secara intens dengan durasi waktu yang cukup panjang agar tercipta ruang yang cukup untuk menyepakati berbagai ketidaksesuaian. Namun karena situasi pandemi maka pertemuan dilakukan secara virtual. Hasil pertemuan virtual merupakan bahan evaluasi bagi dinas dan tim untuk merancang langkah strategis berikutnya. Permasalahan kedua yang dihadapi dinas pendidikan terjadi karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan partisipasi stakeholder pendidikan dalam masa pandemi serta tingginya biaya pelaksanaan pertemuan yang melibatkan banyak stakeholder. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan program berbasis web untuk menggalang partisipasi seluas-luasnya serta dilakukan focus group discussion menggunakan media zoom dan whatsapp. Media ini digunakan untuk melakukan diskusi terkait berbagai permasalahan yang menimpa setiap sekolah dan dituangkan dalam tabel perhitungan.

Prosedur pelaksanaan strategi di atas dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat berulang dan berkelanjutan. Berulang karena diperlukan pemahaman yang mendalam sehingga satu kegiatan dapat dilakukan beberapa kali untuk memberikan pemahaman yang baik. Berkelanjutan dikarenakan satu kegiatan merupakan rangkaian dari kegiatan berikutnya. Kegiatan diawali dengan mengadakan pertemuan dengan dinas pendidikan kabupaten Mojokerto, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kualitas pendidikan yang sudah dicapai sampai dengan saat pelaksanaan kegiatan beserta program yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan hasil diskusi dengan dinas, maka diadakan pertemuan 1 dengan sekolah sebagai pelaksana proses pembelajaran siswa untuk melakukan verifikasi data yang didapat dari dinas melalui pertemuan langsung dengan sekolah.

Melalui diskusi langsung tersebut, maka diperoleh data awal kondisi pendidikan yang valid serta mendapatkan saran untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Berdasarkan kondisi awal ditemukan bahwa pengembangan web-survey disepakati dapat menjadi salah satu solusi permasalahan dalam meningkatkan partisipasi publik sekaligus menunjukkan transparansi dinas pendidikan kepada publik. Pertemuan kedua dengan sekolah dilanjutkan secara daring untuk merumuskan model pengembangan web yang dibutuhkan. Setelah pertemuan daring tersebut, dihasilkan disain web yang efisien dan efektif untuk menjangkau partisipasi publik dan melakukan uji coba program yang melibatkan beberapa sekolah. Dalam sesi uji coba, dipilih sekolah yang mewakili sekolah dengan kualifikasi atas, menengah dan bawah ditinjau dari prestasi dan lokasi sekolah. Hasil uji coba menjadi bahan masukan bagi pengembang program untuk menyempurnakan disain. Hasil pengembangan program yang sudah disempurnakan mulai disosialisasikan dalam pertemuan 3 secara daring untuk melakukan pengisian bersama program perhitungan BOSDA. Pada pertemuan ini, hanya sekolah saja yang melakukan pengisian. Pemilihan sekolah adalah berdasarkan keterwakilan di setiap kawedanan dengan memberikan hak akses sebagai partisipan. Namun, tidak dibatasi sekolah mana yang akan berpartisipasi.

Pertemuan berikutnya adalah pertemuan 4 yang masih dilaksanakan secara daring, dengan partisipan yang berbeda yaitu komite sekolah, dan wakil masyarakat umum. Setiap sekolah diperkenankan mengundang ke dalam pertemuan secara daring ketua komite ataupun anggotanya. Selain komite, masyarakat umum terutama yang memiliki siswa usia sekolah juga diperkenankan hadir secara daring. Komite sekolah dan masyarakat umum dipersilakan hadir di zoom untuk mendengarkan arahan tim pengabdian masyarakat. Setelah zoom meeting selesai, setiap partisipan boleh masuk ke web dengan hak akses sebagai partisipan publik. Partisipasi ini dibuka selama 1 minggu setelah zoom.

Berdasarkan masukan dari partisipan publik, maka sekolah bertugas mengakomodir pendapat dan masukan publik dengan melakukan revisi template masing-masing. Oleh karena itu, web dibuka selama 1 minggu untuk proses revisi dari sekolah. Kegiatan berikutnya adalah pertemuan 5, yaitu saat presentasi dan penggabungan seluruh template masing-masing sekolah beserta hasil kumulatif seluruh sekolah yang berpartisipasi. Pada saat inilah dihasilkan rekomendasi perhitungan nilai BOSDA.

Berdasarkan prosedur tersebut maka pengumpulan data berlangsung saat pertemuan baik luring maupun daring serta data yang diinput ke dalam aplikasi perhitungan BOSDA. Hasil yang didapatkan selanjutnya dideskripsikan ke dalam narasi yang relevan dengan pemecahan permasalahan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis diuraikan sebagaimana berikut ini. Langkah pertama, berdasarkan notulen dalam setiap pertemuan maka tim merangkum pokok-pokok pikiran pertemuan untuk dijadikan sebagai pernyataan pengarah (*guiding statement*). Selanjutnya, langkah kedua, berdasarkan pokok pikiran tersebut, dibuat model aplikasi berbasis web untuk menentukan target yang ingin dicapai dan merumuskan strategi pencapaian target. Berdasarkan strategi yang dipilih, maka partisipan sekolah menghitung BOSDA menggunakan template yang disediakan. Hasil perhitungan dituangkan ke dalam power point untuk mendapatkan tanggapan para stakeholder pada saat zoom. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan stakeholder terhadap hasil yang sudah dipresentasikan. Apabila masih terdapat ketidakpuasan, maka dilakukan perhitungan ulang sampai mendapatkan angka yang diharapkan dan rasional dalam mencapai target yang diharapkan. Ketika angka yang diharapkan telah disepakati, maka data tersebut dituangkan ke dalam berita acara untuk diberikan kepada dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto yang juga berfungsi sebagai laporan kegiatan. Simpulan diambil dengan melakukan kuis agar partisipan leluasa menyampaikan pandangannya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagai penanggung jawab urusan pendidikan di Kabupaten Mojokerto berkewajiban menyebarluaskan informasi kegiatan agar partisipan dapat menjangkau wilayah dan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Di samping itu, mitra bertugas menyelenggarakan kegiatan workshop terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan dinas pendidikan dan osekolah. Seluruh biaya yang terjadi dibiayai oleh dinas pendidikan.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Pertemuan pendahuluan untuk menggali data awal dilaksanakan di kantor dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan menghasilkan data kondisi keuangan pendidikan awal sebagaimana berikut ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah menganggarkan bantuan operasional bagi sekolah dan siswa tidak mampu melalui beberapa sumber dana dan kegiatan. Sumber pertama adalah Dana Alokasi Khusus, untuk rehabilitasi sekolah yang dilaksanakan secara bergiliran sesuai usulan sekolah kepada dinas. Namun realisasi program ini merupakan hak prerogative dinas untuk menentukan sekolah yang diprioritaskan sehingga sangat potensial menimbulkan ketidakpuasan bagi sekolah yang belum menerima bantuan. Sumber kedua adalah bantuan siswa miskin dari APBD, dimana dinas mendapat usulan dari sekolah dengan syarat dan ketentuan tertentu, dan dari APBN dalam bentuk Program Indonesia Pintar dimana dana langsung diterimakan ke siswa tanpa melalui sekolah. Sumber dana ketiga yaitu bantuan lomba sekolah adiwiyata, dimana pembinaan dan dukungan dinas kepada sekolah agar dapat mengelola lingkungan dan melestarikannya dalam kondisi bersih dan indah. Wujud bantuan berupa alat-alat penunjang adiwiyata bagi SD dan SMP di wilayah kabupaten Mojokerto, seperti mesin pencacah kompos/sampah, tempat sampah stainless, dan pot bunga. Sumber lainnya yaitu bantuan pembinaan, bantuan guru honorer dan bantuan buku dan alat tulis bagi siswa. Program-program bantuan tersebut merupakan hasil kajian dinas pendidikan berdasarkan data yang mereka dapatkan dengan melalui kordinasi internal di antara pegawai terkait di dinas. Namun sebagai dasar perhitungan BOSDA maka hanya bantuan operasional yang akan disertakan dalam template perhitungan. Berdasarkan informasi tersebut maka formula besaran anggaran BOSDA dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Formula Besaran Anggaran BOSDA

Pertemuan pertama sudah masuk pada kegiatan inti, dilaksanakan dengan mengundang perwakilan sekolah dari 4 kawedanan mulai dari TK sampai dengan SMP baik sekolah negeri maupun swasta. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sooko. Tujuan pertemuan ini adalah mengidentifikasi harapan dan target sekolah dilihat dari persepsi kepala sekolah (beserta guru) dan kelapa dinas sebagai pemangku kebijakan. Dengan mengetahui harapan dan target sekolah maka program-program sekolah prioritas dapat dibuat. Selain itu, pertemuan pertama ini telah menghasilkan gambaran bagaimana mereka mengelola dana BOS selama ini. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa para kepala sekolah membuat inovasi dengan membangun kantin tidak permanen dan memungut partisipasi dari kantin, sekolah juga melakukan pendekatan kepada komite sekolah untuk menyampaikan program sekolah yang masih belum terdani sehingga orang tua murid dapat memberikan bantuan sukarela yang dikelola oleh komite sekolah tanpa intervensi sekolah agar tidak terdapat kesan pungutan berasal dari sekolah, dan masih banyak ‘trik’ kepala sekolah demi meniyasati kekurangan biaya operasional termasuk ibu dan bapak guru menyumbang saat menerima gaji-13. Simpulan dari pertemuan pertama ini memberikan petunjuk bahwa kepala sekolah telah memiliki target untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan. Kesamaan tujuan antara sekolah dan dinas pendidikan dapat dilihat dari berbagai program yang dibuat oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto. Hasil diskusi mengarahkan pada simpulan bahwa program-program yang dikembangkan dinas belum dapat menyentuh kebutuhan sekolah karena keterbatasan anggaran dinas dan perbedaan pusat perhatian. Hal ini dapat terlihat dari komentar para kepala sekolah terhadap program bantuan buku dari dinas pendidikan yang diberikan pada saat yang tidak sesuai sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Para kepala sekolah juga menyampaikan penilaian kurang positif terhadap program tersebut karena mereka beranggapan sekolah telah memiliki buku yang cukup untuk melaksanakan proses pembelajaran.

Pertemuan kedua, mengembangkan hasil diskusi pada pertemuan pertama, yaitu mengidentifikasi komponen pembiayaan yang diperlukan untuk merealisasikan target-target yang telah mereka susun. Komponen-komponen pembiayaan yang sudah teridentifikasi digunakan untuk menyusun pengembangan web survey. Hasil pengembangan web dipaparkan pada saat pertemuan ketiga secara virtual. Para kepala sekolah diminta memberikan masukan atas aplikasi web yang sudah dibuat untuk menguji keamanan dan kemudahan penggunaan bagi partisipan. Pada pertemuan ini, tim narasumber memberikan sosialisasi untuk menyamakan persepsi terkait target pendidikan berkualitas dan anggaran pemerintah, khususnya untuk urusan pendidikan untuk menurunkan program sekolah yang efektif.

Berikut ini adalah gambaran aplikasi perhitungan BOSDA berbasis web sebagaimana disajikan pada Gambar 2. Tahap pengembangan awal dimulai dari pengembangan spesifikasi kebutuhan system dengan membuat alur proses bisnis. Setelah proses bisnis teridentifikasi maka akan dapat diidentifikasi sumber input, yaitu menelusuri darimana data berasal dan teknik entry data yang digunakan. Berdasarkan input data tersebut maka system akan menghasilkan output berupa: (1) informasi biaya item belanja per detil kegiatan; (2) informasi rekapitulasi survey biaya item belanja dan (3) spreadsheet rekapitulasi survey biaya item belanja.

FORMULIR SPESIFIKASI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN SISTEM	
Alur Proses	
Sumber Input	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Program Sekolah (Migrasi) • Daftar Kegiatan Sekolah (Migrasi) • Daftar Detil Kegiatan Sekolah (Migrasi) • Nominal Biaya Detil Kegiatan Sekolah (Input)
Hasil Output	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Biaya Item Belanja per detil kegiatan • Informasi Rekapitulasi Survey Biaya Item Belanja • Spreadsheet Rekapitulasi Survey Biaya Item Belanja
Relasi Basis Data	

Spesifikasi Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Hardware PC Server • Software Linux CentOS • Network IP Public • Processor Xeon • Programming PHP, JavaScript • Protocol TCP/IP • Memory 32Gb 	<ul style="list-style-type: none"> • Database MariaDB • Port 80 • Storage 1Gb • Library bosda • Bandwith 10Mbps • Security Firewall,MD5
---------------------------	--	---

Gambar 2. Spesifikasi Kebutuhan Pembangunan Sistem

Pada pertemuan ke-empat, partisipan dari sekolah diundang untuk mengisi template setelah template direvisi berdasarkan hasil uji coba. Hasil dari pertemuan ini tidak dapat langsung dieksekusi melainkan diberi waktu 7 hari untuk mengisi secara lengkap. Selain partisipan yang hadir pada pertemuan zoom, sekolah lain yang bersedia berpartisipasi juga dapat meminta hak akses kepada tim PKM sebagai administrator web. Pertemuan ke-lima, melibatkan komite sekolah dan masyarakat umum untuk memeriksa dan memberikan komentar atau ulasan atas hasil perhitungan yang sudah ada. Komentar diberikan langsung ke komponen mana yang ditanggapi dan sekolah mana. Tanggapan dan komentar dibuka selama 7 hari. Setelah tanggapan dan komentar ditutup, maka partisipan sekolah diminta memperbaiki sesuai masukan dan memberi penjelasan jika tidak menerima masukan. Hasil dari pertemuan 5 disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten Mojokerto sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Berikut adalah jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam web-survey. Pada dasarnya seluruh sekolah dapat berpartisipasi, namun tidak terdapat paksaan untuk hadir dalam kegiatan ini.

Tabel 1. Jumlah Partisipan Sekolah dalam Web Survey
Perhitungan Biaya Operasional Sekolah Kabupaten Mojokerto

Wilayah	TK		SD		SMP		SLB	
	Jml	part	Jml	part	Jml	Part	Jml	part
Kec. Trawas	13	1	15	2	3	2	0	0
Kec. Sooko	26	2	15	5	7	2	2	0
Kec. Mojoanyar	21	1	19	2	2	2	0	0
Kec. Puri	29	1	24	2	11	2	0	0
Kec. Gondang	14	1	18	3	4	3	0	0
Kec. Trowulan	25	2	20	2	8	2	0	0
Kec. Dlanggu	22	2	20	5	5	2	1	0
Kec. Bangsal	26	2	21	3	6	2	0	0
Kec. Pacet	24	0	24	2	8	3	1	0
Kec. Gedeg	26	2	24	3	7	2	1	0
Kec. Jatirejo	24	2	23	2	4	3	0	0
Kec. Mojosari	35	3	27	2	15	2	1	1
Kec. Kemlagi	24	2	25	2	6	2	1	0
Kec. Dawar Blandong	22	3	24	2	5	2	1	1

Kec. Kutorejo	25	2	26	3	9	3	0	0
Kec. Pungging	28	2	29	2	8	2	0	0
Kec. Jetis	33	1	32	2	6	2	0	0
Kec. Ngoro	38	2	32	3	10	3	0	0
Total	455	31	418	47	124	41	8	2
		7%		11%		33%		25%

Table tersebut menunjukkan bahwa jumlah partisipan sekolah tertinggi adalah ditingkat SMP sebesar 33% dan SLB sebesar 25%. Hal ini dapat dipahami karena semakin tinggi tingkat sekolah akan memerlukan biaya operasional yang tinggi. Demikian pula dengan SLB yang memerlukan berbagai alat peraga dan pembantu bagi siswa berkebutuhan khusus. Hasil pengisian angket terhadap kesediaan partisipan mengisi survey memberikan deskripsi sebagai berikut:

Table 2. Persepsi Kegunaan Web Survey menurut Partisipan Sekolah

Persepsi Kegunaan	Sangat Setuju	Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Akses mudah	91	8	0	10	0
Pengisian mudah	22	10	8	64	4
Menjaga privasi	36	26	16	24	6
Efisiensi waktu	100	9			
Murah	68	36	5		
Cakupan luas	99	10			

Table 2 memberikan gambaran kegunaan web survey dalam perhitungan biaya operasional. Sebanyak 64% Partisipan sekolah menganggap penggunaan web survey memiliki kegunaan. Dimana partisipan menilai bahwa kegunaan paling tinggi adalah dalam hal efisiensi waktu dan cakupan yang luas.

Table 3. Persepsi Kegunaan Web Survey menurut Partisipan Publik

Persepsi Kegunaan	Sangat Setuju	Setuju	Biasa Saja	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Akses mudah	34	18	0	2	2
Pengisian mudah	12	18	2	19	4
Menjaga privasi	16	12	14	13	0
Efisiensi waktu	48	7			
Murah	46	6	3		
Cakupan luas	50	6			

Table 3 memberikan gambaran kegunaan web survey dalam perhitungan biaya operasional. Sebanyak 62% Partisipan publik menganggap penggunaan web survey memiliki kegunaan. Dimana

partisipan menilai bahwa kegunaan paling tinggi adalah dalam hal cakupan yang luas dan efisiensi waktu.

Kedua table tersebut mengonfirmasi bahwa penggunaan web survey memberikan manfaat perluasan akses untuk berpartisipasi dalam perhitungan biaya pendidikan. Perluasan partisipan dapat terwujud karena dapat menjangkau partisipan meskipun tidak berada di dekat area sekolah. Partisipan juga dapat tetap mengisi web survey meskipun kesibukan mereka cukup padat. Di samping itu, pengambilan data memiliki rentang waktu 1 minggu sehingga mereka dapat mengisi sesuai dengan waktu yang dapat mereka sediakan.

Secara keseluruhan disimpulkan bahwa pelaksanaan web survey mampu dilaksanakan dengan biaya yang relative ekonomis. Waktu yang dibutuhkan dari perencanaan sampai dengan penyampaian hasil perhitungan terhitung sebagai berikut:

Tabel 4. Time Plan Perhitungan Biaya Operasional Sekolah

Aktivitas	Waktu yang dibutuhkan	
Perencanaan	3	hari
Pengembangan web	5	hari
Uji coba	1	hari
Sosialisasi	1	hari
Pengisian - Sekolah	7	hari
Pengisian - Publik	7	hari
Revisi	7	hari
Finalisasi	3	hari
Total	34	hari

Dalam kurun waktu 34 hari perhitungan dapat dilakukan dan dipublikasikan melalui web. Setiap anggota masyarakat dapat mengunjungi web tersebut meskipun dalam kurun waktu yang terbatas. Hal ini dikarenakan batas waktu sewa web hosting hanya 6 bulan. Metode ini akan lebih baik jika dilaksanakan di web dinas pendidikan sendiri agar tidak perlu menyewa web hosting dan mendukung transparansi informasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian atas hasil perhitungan, dinas dapat melakukan klarifikasi ke sekolah yang mengisi template. Dengan demikian public tetap dapat memantau perkembangan yang terjadi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan public kepada pemerintah khususnya dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Hasil akhir perhitungan sebagai output dari proses partisipasi dalam perhitungan biaya operasional sekolah diharapkan dapat terus dilakukan baik secara mandiri oleh dinas pendidikan kabupaten Mojokerto maupun bekerjasama dengan tim pengabdian kepada masyarakat. Perhitungan yang dilakukan secara cermat oleh pelaku langsung yaitu sekolah dan dipantau oleh public (komite sekolah, orang tua siswa, masyarakat umum, organisasi atau asosiasi yang berfokus pada pendidikan dan lain-lain). Rekapitulasi perhitungan menunjukkan bahwa dalam proses operasional sekolah, teridentifikasi ada 13 komponen penting. Dari ke-13 komponen tersebut, sebagian besar telah diakomondir dalam RKS dengan dana BOS nasional namun jumlah yang dialokasikan masih kurang. Kemudian rincian komponen kebutuhan yang masih memerlukan tambahan anggaran di luar yang didanai dana BOS adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pembiayaan pembelajaran dalam jaringan, luar jaringan dan deliveri
- b. Kegiatan pelatihan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan
- c. Pembinaan peserta didik dan kegiatan ekstra kurikuler peserta didik
- d. Kegiatan penilaian dan ujian

- e. Inovasi dan pencitraan lembaga
- f. Pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung/bangunan sekolah
- g. Peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan YME dan pembentukan karakter bangsa
- h. Membantu peserta didik miskin
- i. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah
- j. Pengembangan perpustakaan dan budaya literasi
- k. Pembayaran honorarium tugas tambahan selain tugas pokok
- l. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer, tenaga kontrak

Hasil akhir perhitungan telah berhasil menghitung rata-rata kebutuhan tambahan sekolah di luar BOS nasional sebagai berikut:

- a. TKN, rata-rata kebutuhan per siswa per bulan adalah Rp32.333,00
- b. SDN, rata-rata kebutuhan per siswa per bulan adalah Rp54.899,00
- c. SMPN, rata-rata kebutuhan per siswa per bulan adalah Rp79,333,00

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, dengan kata lain penggunaan web-survey ini meningkatkan partisipasi stakeholders sekolah. Hal ini penting karena semakin beragam dan banyak pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini, maka tim mengharapkan terjadi penyamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan pendidikan.

Simpulan

Seluruh rangkaian kegiatan menghasilkan simpulan bahwa kegiatan penyamaan persepsi masih menyisakan perbedaan pandangan antara kepala sekolah dan kepala dinas dalam hal kebermanfaatan program bantuan operasional sekolah dari pemerintah daerah. Perbedaan pandangan ini belum dapat dipertemukan saat pertemuan virtual, namun seluruh pihak menyadari arti penting penganggaran pendidikan. Hasil penting kedua adalah terkait dengan efektivitas penggunaan web survey yang telah berhasil mendukung partisipasi dibuktikan dengan cakupan asal peserta yang melingkupi seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto. Dari segi efisiensi, Web survey merupakan aplikasi yang membantu memudahkan pekerjaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Di atas semua hasil tersebut, hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sekolah masih memerlukan anggaran tambahan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berbasis permasalahan di masyarakat sehingga implementasi solusi-solusi yang ditawarkan perlu untuk dibahas sampai tuntas dan berkesinambungan. Keterbatasan waktu dan anggaran menjadi persoalan yang harus disiasati dengan mengadopsi program ini ke dalam program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Bagi kegiatan selanjutnya dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan pemantauan dan penilaian atas program-program yang relevan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto karena telah memfasilitasi pertemuan dan ikut mendukung dengan ikut memberikan feedback atas simpulan implementasi kegiatan.

Daftar Pustaka

Amarullah, R. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi, Serta Kaitannya Dengan Otonomi Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3), 284–304.

<https://doi.org/10.24258/jba.v9i3.124>

- Huda, M. K., Hernoko, A. Y., & Nugraheni, N. (2018). The problematic of provincial tax collection as local own-source revenue in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(1), 1–8.
- Huda, S., & Fitriyah, Z. (2017). Model Pemetaan Potensi Daerah Menuju Kemandirian Fiskal Di Jawa Timur. *Neo - Bis*, 11(2), 154–174. Retrieved from <http://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/viewFile/3451/pdf5>
- Sulvia, W. O., & Nursalam, L. O. (2020). Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Maabholu Kec Loghia Kab Muna. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 1(Pendidikan), 8. Retrieved from [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1489299&val=12159&title=FAKTOR OR Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Maabholu Kecamatan Loghia Kabupaten Muna](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1489299&val=12159&title=FAKTOR%20Penyebab%20Rendahnya%20Tingkat%20Pendidikan%20Masyarakat%20Di%20Desa%20Maabholu%20Kecamatan%20Loghia%20Kabupaten%20Muna)
- Wernerfelt, B. (1984). Harmonised implementation of Application-Specific Messages (ASMs). *Strategic Management Journal*, CINCO(2), 1–12.
- Zahra, R. A., Prakosa, M. G., Olivia, E., Kusuma, D., Prahara, I., & Valentino, B. (2020). Analytical hierarchy process for regional development priority in Donorejo , Central Java. In *the 6th International Conference on Science and Technology (ICST 2020)* (Vol. 200, pp. 1–5). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020007001>